

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Rangkaian kegiatan pengamatan dan perhitungan yang sudah dilakukan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini bertujuan untuk menjawab beberapa poin penting pada rumusan masalah di Bab I. Kesimpulan atas rumusan masalah yang sudah disusun dapat diuraikan dalam beberapa poin berikut ini.

- 1) Mekanisme pemungutan PBB P2 Kabupaten Kebumen menggunakan sistem *Official Assessment*. Proses pemungutan dilimpahkan kepada perangkat desa setelah SPPT diterbitkan dan didistribusikan oleh BPKPD Kabupaten Kebumen. Proses mekanisme pemungutan PBB P2 di Kabupaten Kebumen mengikuti ketentuan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembayaran PBB P2 bisa dilakukan melalui beberapa pihak seperti petugas pemungut dari desa, Kantor Pos, Bank Jateng, Alfamart, Indomaret, dan kanal pembayaran online seperti Tokopedia, Ovo, GoPay, dan lain sebagainya.
- 2) Hambatan dalam proses pemungutan PBB P2 di Kabupaten Kebumen cukup beragam. Hambatan dalam pelaksanaan proses pemungutan PBB P2 dibagi menjadi dua keadaan sebagai berikut:

- a. Sebelum adanya aplikasi SIPBB, hambatan yang dirasakan oleh petugas pemungut terkait administrasi PBB P2 adalah proses yang masih manual dan sering terdapat data WP yang sudah membayar namun belum terkonfirmasi lunas dari sistem yang ada di BPKPD Kabupaten Kebumen.
 - b. Hambatan setelah adanya aplikasi SIPBB dan sudah ada semenjak belum adanya aplikasi SIPBB adalah belum sepenuhnya WP dalam melengkapi data saat melakukan pendaftaran objek pajak baru. Masih terdapat banyak dokumen Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tidak lengkap. Banyak berkas yang masih tidak melampirkan surat tanah dari ATR/BPN sehingga petugas hanya bisa melakukan input data sesuai dengan apa yang ditulis pada lembar SPOP tanpa bukti kuat terkait luas tanah dari objek pajak tersebut. Selain itu, hambatan juga masih terdapat pada proses perhitungan NJOP dan proses pembayaran PBB P2. Pengajuan keberatan dari WP menjadi rutinitas setiap hari bagi pegawai di BPKPD Kabupaten Kebumen.
- 3) Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Kebumen dalam mengatasi hambatan yang ada. Upaya yang gencar dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat agar hambatan pada proses pendaftaran objek pajak, pendataan, penghitungan NJOP, dan pembayaran PBB P2 dapat teratasi.
 - 4) Usaha dalam meningkatkan penerimaan PBB P2 Kabupaten Kebumen dilakukan oleh BPKAD dengan cara mengadakan acara gebyar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Acara tersebut diadakan satu tahun sekali dengan agenda utamanya adalah undian berhadiah mulai dari

payung, kulkas, sampai dengan kendaraan roda dua. Undian dilakukan berdasarkan nomor SPPT yang telah membayar lunas kewajiban PBB P2nya. Acara gebyar ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Kabupaten Kebumen khususnya Wajib Pajak PBB P2 dalam membayar kewajiban PBB P2. Dengan adanya acara Gebyar Pajak ini program SHL (Satu Hari Lunas) yang diadakan di setiap kantor desa bisa berangsur ramai setiap tahunnya. Semua kategori masyarakat baik yang memiliki nominal pajak terutang tinggi maupun yang rendah berhak diundi untuk mendapatkan hadiah menarik yang sudah disiapkan.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah diberikan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Mengenai pembayaran PBB P2 melalui kanal pembayaran *online* sebaiknya bisa lebih ditingkatkan sosialisasinya agar masyarakat Kebumen bisa segera lebih mengenal bahwa pembayaran PBB P2 tidak hanya melalui perangkat desa. Berdasarkan pengamatan penulis, sistem pembayaran *online* yang kini ada masih belum cukup optimal dan warga masih cenderung melakukan pembayaran melalui petugas pemungut dari desa. Apabila sosialisasi dan kemudahan akses pembayaran melalui *online* bisa dioptimalkan, maka penerimaan PBB P2 di Kabupaten Kebumen bisa mendekati 100 persen sebelum jatuh tempo pembayaran.

- 2) Wajib Pajak Kabupaten Kebumen sebaiknya bisa memperhatikan lebih baik lagi mengenai ketentuan dalam melakukan mutasi objek pajak. Pengisian berkas SPOP dan LSPOP sebaiknya dilakukan dengan lebih cermat dan hati-hati agar petugas tidak mengalami kesulitan saat melakukan pendataan melalui komputer.
- 3) Perangkat desa sebaiknya bisa membantu semaksimal mungkin dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah desanya. Pencapaian target 100 persen pada setiap kegiatan SHL (Satu Hari Lunas) harus benar-benar dibuat semenarik mungkin agar warga bisa lebih antusias menghadiri acara tersebut. Pemberian doorprize atau hadiah bisa dipertimbangkan agar bisa menarik WP untuk melunasi kewajiban PBB P2 terutangnya.
- 4) Penggunaan aplikasi SIPBB hendaknya bisa lebih dioptimalkan tampilannya agar bisa lebih nyaman diakses melalui *smartphone*. Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat saat ini lebih banyak yang memiliki *smartphone* daripada laptop atau komputer. Dengan diperbaikinya *interface* aplikasi SIPBB pada tampilan *smartphone* diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri sehingga lebih mudah untuk digunakan dimana saja.
- 5) Penulis menyarankan apabila penelitian berikutnya membahas kembali mengenai penerimaan PBB P2 di Kabupaten Kebumen, bisa dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak penerapan aplikasi SIPBB P2 dalam proses pemungutan PBB P2 di Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun kedepan. Aplikasi SIPBB P2 ini cukup menarik dibahas karena masih perlu banyak pengembangan agar bisa optimal dalam mencapai beberapa tujuan

khususnya PBB P2 dan harapannya dapat lebih mudah digunakan oleh semua kalangan Wajib Pajak di Kabupaten Kebumen.